



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FADLANSYAH LUBIS**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DUKUNGAN KABINET**
3. NHK : **135950**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 32.175.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/375 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 8.460.000.000
2. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/231 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 16.360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.513.000.000**

1. MOTOR, PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
3. MOBIL, BMW CX1 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
4. MOBIL, VW POLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000
5. MOBIL, MINI COOPER MINIBUS/COOPER CLUBMAN Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. MOBIL, MERCEDES-BENZ SEDAN 190E Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 174.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.864.862.665
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	43.726.862.665
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	43.726.862.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.